**PROBLEMATIKA PENERAPAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD NURUDIN**

**NPM. 5119500085**

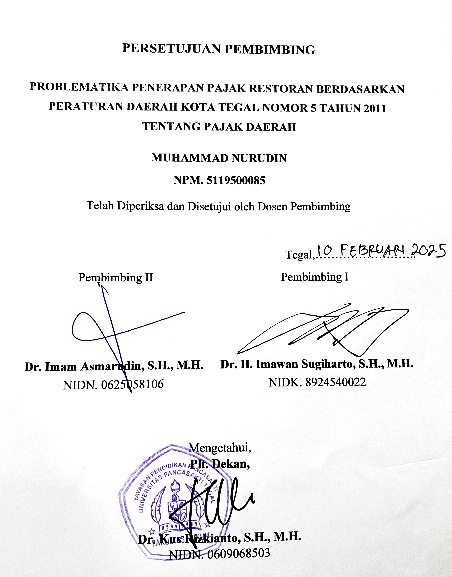
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

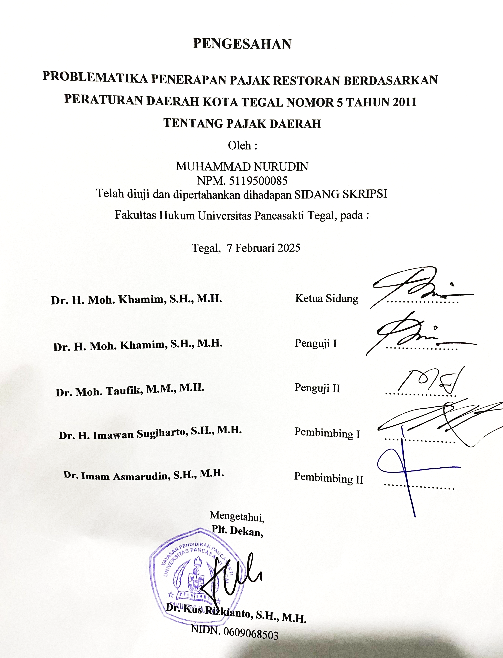
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

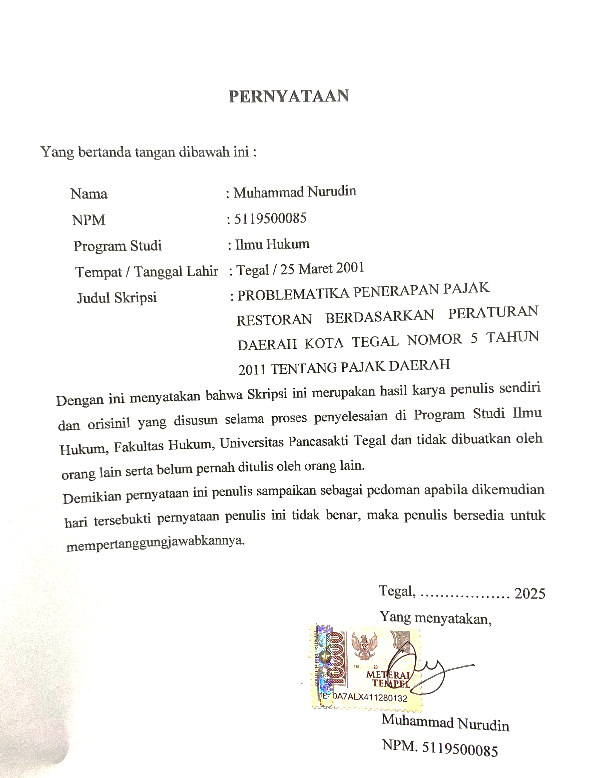
# PERSETUJUAN PEMBIMBING



# PENGESAHAN



# PERNYATAAN



# ABSTRAK

Sektor pajak merupakan pendapatan terbesar Negara Indonesia yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dapat menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip pajak pertambahan nilai dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah seperti pada penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan restorasi atau makanan di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya di Kota Tegal. Pengaruh sosial penerapan PPN pada restorasi adalah kompleks. Ini memengaruhi perilaku konsumen, harga makanan dan minuman, dan ketersediaan makanan. PPN dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat makan, membatasi akses makanan bagi sebagian masyarakat, dan berpotensi merusak bisnis restoran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal dan mengkaji problematika penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal.

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan sistem hukum sebagai landasan norma dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal dalam perspektif hukum tata negara, penerapan pajak restoran di Kota Tegal merupakan perwujudan dari desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak demi kepentingan pembangunan daerah. Problematika penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, pemahaman wajib pajak, serta implementasi pengawasan dan transparansi.

***Kata Kunci : Perda Kota Tegal, Pajak Daerah, Pajak Restoran***

# ***ABSTRACT***

*The tax sector is the largest revenue of the State of Indonesia which is very important for the implementation and improvement of national development and aims to increase the prosperity and welfare of the community. The implementation of an increase in the value-added tax rate can cause problems. Because of the dilemma in the community that the principle of value-added tax where taxes are generally imposed on almost all types of taxpayers does not distinguish the consumption of goods and services from the upper middle class or lower middle class, such as in the application of value-added tax (VAT) on restoration services or food in restaurants, cafes, and other places to eat in Tegal City. The social impact of VAT on restoration is complex. This affects consumer behavior, food and beverage prices, and food availability. VAT can influence consumers' decisions in choosing where to eat, limit access to food for some people, and potentially damage the restaurant business.*

*This study aims to examine the application of value-added tax in restaurants in Tegal City and examine the problems of the application of value-added tax in restaurants in Tegal City.*

*The type of research that will be used to analyze this research uses library research which is carried out by researching library materials or secondary data. This research approach is juridical-normative, or legal research that uses the legal system as the basis for norms by using primary data and secondary data.*

*The results of this study show the application of value-added tax on restaurants in Tegal City from the perspective of constitutional law, the implementation of restaurant tax in Tegal City is a manifestation of fiscal decentralization, where local governments are given the authority to manage taxes for the benefit of regional development. The problem of implementing value-added tax on restaurants in Tegal City still faces challenges in terms of regulation, taxpayer understanding, and the implementation of supervision and transparency*.

***Keywords: Tegal City Regulation, Regional Tax, Restaurant Tax***

# PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk dedikasi atas segala usaha dan perjuangan yang telah saya tempuh. Penulisan skripsi ini bukan hanya merupakan pencapaian akademik pribadi, tetapi juga sebagai bukti kasih dan penghargaan kepada orang-orang yang telah mendukung saya sepanjang perjalanan ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. **Allah SWT**, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini. Tanpa-Nya, segala usaha ini tidak akan terwujud.
2. **Orang tua saya**, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti, telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan kepercayaan yang telah diberikan.
3. **Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Dosen Pembimbing**, **serta Dosen Penguji** yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan kritik konstruktif yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, yang tak ternilai harganya.
4. **Teman-teman seperjuangan**, yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan motivasi dalam setiap langkah saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dengan segala tawa, canda, dan diskusi yang membuat semuanya lebih berarti.
5. **Seluruh pihak yang terlibat**, yang meskipun namanya tak dapat disebutkan satu per satu, namun memiliki andil besar dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Pendidikan Sains, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, saya berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca, serta menjadi bagian dari perjalanan panjang saya dalam dunia ilmu pengetahuan.

# MOTTO

*“Semua Orang Punya Jam, Tapi Tidak Dengan Waktu”*

*~ Madste ~*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PENERAPAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Kepada Bapak Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, ……………….

Penulis,

Muhammad Nurudin

NPM. 5119500085

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc189706565)

[PENGESAHAN ii](#_Toc189706566)

[PERNYATAAN iii](#_Toc189706567)

[ABSTRAK iv](#_Toc189706568)

[*ABSTRACT* v](#_Toc189706569)

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc189706570)

[MOTTO vii](#_Toc189706571)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc189706572)

[DAFTAR ISI x](#_Toc189706573)

[BAB I 1](#_Toc189706574)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc189706575)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc189706576)

[B. Rumusan Masalah 7](#_Toc189706577)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc189706578)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc189706579)

[E. Tinjauan Pustaka 9](#_Toc189706580)

[F. Metode Penelitian 13](#_Toc189706581)

[1. Jenis Penelitian 13](#_Toc189706582)

[2. Pendekatan Penelitian 13](#_Toc189706583)

[3. Sumber Data 14](#_Toc189706584)

[4. Metode Pengumpulan Data 15](#_Toc189706585)

[5. Metode Analisis Data 15](#_Toc189706586)

[G. Sistematika Penulisan 16](#_Toc189706587)

[BAB II 18](#_Toc189706588)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 18](#_Toc189706589)

[A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara 18](#_Toc189706590)

[1. Pengertian Hukum Tata Negara 18](#_Toc189706591)

[2. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara 20](#_Toc189706592)

[B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah 24](#_Toc189706593)

[1. Pengertian Pajak Daerah 24](#_Toc189706594)

[2. Ruang Lingkup Pajak Daerah 28](#_Toc189706595)

[C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah 32](#_Toc189706596)

[1. Pengertian Peraturan Daerah 32](#_Toc189706597)

[2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah 35](#_Toc189706598)

[D. Tinjauan Umum Tentang Gambaran Umum Kota Tegal 39](#_Toc189706599)

[1. Gambaran Umum Kota Tegal 39](#_Toc189706600)

[BAB III 44](#_Toc189706601)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44](#_Toc189706602)

[A. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Restoran Di Kota Tegal 44](#_Toc189706603)

[B. Problematika Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Restoran Di Kota Tegal 57](#_Toc189706604)

[BAB IV 66](#_Toc189706605)

[PENUTUP 66](#_Toc189706606)

[A. Kesimpulan 66](#_Toc189706607)

[B. Saran 67](#_Toc189706608)

[DAFTAR PUSTAKA 69](#_Toc189706609)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76](#_Toc189706610)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Suatu daerah dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang kecil. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan asli daerah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hal penting terkait dengan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi *fiscal* adalah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan.[[1]](#footnote-1)

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang

diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.[[2]](#footnote-2)

Sektor pajak merupakan pendapatan terbesar Negara Indonesia yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbul akan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak.[[3]](#footnote-3)

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi. Pajak diharapkan dapat memutar roda perekonomian negara melalui penyertaan modal terhadap pembangunan dan perusahaan-perusahaan milik negara, sehingga dengan adanya pajak dalam suatu negara dapat memberikan peningkatan dalam pengeluaran guna kepentingan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang berdampak rekanan pemerintah yakni sektor swasta. Dalam hal ini pajak sebagai instrumen utama dalam penyokong APBN negara, harus melakukan peran multidimensi.[[4]](#footnote-4)

Penerimaan negara yang berasal dari pajak terdiri dari beberapa jenis sumber pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), juga berasal dari Bea Materai, Bea Cukai, Bea Impor, dan Bea Ekspor. Untuk membiayai pengeluaran, pajak penghasilan telah kontribusi terbesar untuk membantu negara dalam pembiayaan pengeluaran, meskipun pajak penghasilan hanya dikenakan bagi wajib pajak tertentu yakni seseorang yang telah memiliki penghasilan dan penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak yang dapat dijadikan wajib pajak bagi pajak penghasilan. Lain halnya dengan pajak pertambahan nilai, pajak ini pelimpahan pembayarannya dilimpahkan atau dikenakan kepada orang lain (*tax amnesty*).[[5]](#footnote-5)

Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dapat menimbulkan problematika. Karena terjadinya dilema di masyarakat bahwa prinsip pajak pertambahan nilai dimana pajak pada umumnya dikenakan hampir ke seluruh jenis wajib pajak tidak membedakan konsumsi barang dan jasa dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah seperti pada penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan restorasi atau makanan di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya di Kota Tegal.

Rangka optimalisasi dan transparansi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara akuntabel, serta guna tercapainya penerimaan pajak daerah secara maksimal, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal melakukan pemasangan alat perekam transaksi usaha. Perekaman data transaksi usaha tersebut dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Data Transaksi usaha Wajib Pajak Secara Online yang diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomro 17.C Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online. Perekaman data transaksi yang dimaksud adalah keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak. Data transaksi pembayaran yang seharusnya dibayar meliputi pembayaran dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku. Pemasangan tersebut difokuskan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.[[6]](#footnote-6) Seperti dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratruan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu:[[7]](#footnote-7)

1. Ketentuan Pasal 19 Ayat 2 huruf e dihapus, huruf g dan huruf i diubah.
2. Ketentuan Pasal 22 huruf e dihapus dan huruf g serta huruf i diubah.
3. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 BAB baru yakni BAB XII A PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK.
4. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 1 ayat baru, yaitu ayat (2A).
5. Diantara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 Pasal baru, yaitu Pasal 65A dan Pasal 65B.
6. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 70 disisipkan 1 ayat baru, yaitu Ayat (3A).
7. Diantara BAB XXVIII dan BAB XXIX disisipkan 1 BAB baru yakni BAB XXVIIIA KETENTUAN PERALIHAN.
8. Ketentuan Pasal 92 dihapus.

Melalui alat perekam tersebut pembayaran dan pembukuan serta tanggungan pajak akan termonitor dengan baik dan laporan atau data dari alat tersebut juga akan langsung terkirim ke Badan Keuangan Daerah Kota Tegal (online). Tujuan pemasangan alat perekam transaksi pembayaran tersebut adalah:

1. Mewujudkan penyelenggara administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
2. Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah.
4. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

Selama tahun 2017-2019, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal telah terealisasi pengadaan alat perekam transaksi pembayaran sebanyak 69 (enam puluh sembilan) unit. Kesemuanya telah dipasang pada mesin kas register untuk wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Namun demikian, sebanyak 3 (tiga) unit alat yang telah terpasang kondisinya rusak dan dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, sehingga jumlah alat yang telah terpasang dan berfungsi dengan baik sebanyak 66 (enam puluh enam) unit.

Pengaruh sosial penerapan PPN pada restorasi adalah kompleks. Ini memengaruhi perilaku konsumen, harga makanan dan minuman, dan ketersediaan makanan. PPN dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih tempat makan, membatasi akses makanan bagi sebagian masyarakat, dan berpotensi merusak bisnis restoran. Pentingnya penelitian ini terletak pada pemahaman dampak sosial dari PPN dalam konteks restorasi dan bagaimana pajak tersebut dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap makanan, ketersediaan makanan yang sehat, serta kesetaraan dalam akses tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “PROBLEMATIKA PENERAPAN PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”

## Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal?
2. Bagaimanakah problematika penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal.
2. Untuk mengkaji problematika penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal.

## Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal memiliki urgensi yang signifikan. Beberapa faktor yang menjadikan penelitian ini penting adalah sebagai berikut:

* 1. Penelitian ini diharapkan dapat memengaruhi perilaku konsumen dan keputusan mereka dalam memilih tempat makan. Penelitian ini dapat memberikan pandangan lebih dalam tentang bagaimana konsumen merasakan dampak pajak ini sehingga dapat mengevaluasi apakah penerapan PPN pada restorasi menciptakan ketidaksetaraan sosial dalam akses terhadap makanan dan minuman, serta mencari solusi yang lebih adil.
  2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana hukum mengatur penerapan PPN pada restorasi dan menciptakan dasar hukum yang lebih kuat dalam konteks pajak sehingga dapat memberikan wawasan tentang peran negara dalam mengatur kebijakan pajak dan menjaga keseimbangan antara pengumpulan pendapatan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam memahami dampak sosial dan hukum dari penerapan PPN pada restorasi serta mencari solusi yang lebih adil dan efektif dalam konteks pajak ini

## Tinjauan Pustaka

Pengambilan penelitian dengan judul “Problematika Penerapan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” merupakan suatu hasil analisis dari peneliti dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk mengkaji Kembali dengan pengambilan persamaan dari tema dan objek penelitian dengan adanya perbedaan pada penelitian ini. berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Puhaneng Enike Limpong dengan penelitiannya pada Jurnal Lex Administratum, Volume 5, Nomor 8, 2017 dengan judul penelitian “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pajak Daerah Dalam Kegiatan Usaha Di Kota Manado”.[[8]](#footnote-8) Penelitian Puhaneng Enike Limpong menjelaskan bahwa Pengaturan hukum terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado, Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 dan ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158). Sebelum diterapkan maka Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kepentingan umum, dan/atau PUU lain yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Puhaneng Enike Limpong terdapat suatu persamaan pembahasan yaitu mengenai pajak daerah dalam kegiatan usaha, sedangkan dalam hal ini terdapat perbedaan dimana penelitian Puhaneng Enike Limpong membahas mengenai Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado sedangkan penulis membahas mengenai penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran dalam perspektif sosiologi hukum.
2. Buyung Cahyoadi dengan penelitiannya pada Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Sosiologi Hukum”[[9]](#footnote-9) Penelitian Buyung Cahyoadi menjelaskan mengenai masih adanya pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004. Penegakan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemerintahan yang baik (*good govermance*) yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu untuk setiap kebijakan yang dibentuk untuk kepentingan rakyat harus menyesuaikan dengan kondisi sosiologis dan keadaan masyarakat setempat. Sehingga peran pemerintah daerah sangat berpengaruh demi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan adanya peraturan daerah bukan hanya sebagai kegiatan administrasi, tetapi sebagai upaya untuk melinduingi dan menjaga keamanan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang bertujuan untuk dapat terciptanya ketertirban masyarakat serta dapat menciptakan ketertiban yang lebih baik di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yaitu mengenai Penegakan hukum yang dilakukan Pemeritah Daerah serta target pajak yang dalam hal penelitian tersebut mengurusi perizinan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima telah bekerja sesuai tugasnya sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pajak restoran di Kota Tegal.
3. Radit Yuniardita Jaya Subangkit, R.A Rini Anggaraini, Ida Bagus Oka Ana dengan penelitiannya pada Artikel Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara dengan judul penelitian “Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”[[10]](#footnote-10) Penelitian Radit Yuniardita Jaya Subangkit, R.A Rini Anggaraini, Ida Bagus Oka Ana menjelaskan bahwa sistem perpajakan dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru, sistem perpajakan ini terdiri atas: Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Undangundang Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan pembahasan yaitu mengenai penambahan jenis retribusi baru diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat terutama aspek kelayakan pemungutan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memilih serta menginventarisasi jenis pungutan yang sesuai dengan potensi daerah, sehingga diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat karena adanya kepastian hukum.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[[11]](#footnote-11) Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan melalui perolehan informasi atau karya ilmiah yang merupakan literatur atau kajian yang dilakukan untuk mengatasi suatu persoalan yang terutama bergantung pada pemeriksaan kritis dan mendalam terhadap sumber daya perpustakaan yang relevan.[[12]](#footnote-12)

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan sistem hukum sebagai landasan norma. Sistem norma yang dipermasalahkan terdiri dari ajaran, perjanjian, aturan hukum dan peraturan, dan asas (ajaran). Data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, publikasi akademik, dan buku-buku hukum, digunakan dalam penelitian permasalahan yang diteliti.[[13]](#footnote-13)

### Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.[[14]](#footnote-14) Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder.[[15]](#footnote-15)

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dan membahas pokok-pokok studi ini, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratruan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum seperti dalam pembentukan perpustakaan yang diperoleh dari literature-literatur lain berupa buku-buku, peraturan-peraturan, hasil penelitian serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perceraian guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Observasi adalah metode pengumpulan data yang diawali dengan observasi dan pencatatan keadaan atau perilaku objek target.[[16]](#footnote-16) Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan di peroleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep- konsep atau teori- teori dan informasi-informasi serta pemikirann konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

### Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, menggunakan data yang telah disusun menjadi kalimat dan dilakukan secara sistematis, lugas, dan logis. berdasarkan konsep hukum, prinsip hukum, norma hukum, dan ketentuan hukum positif. Metodologi diskusi menyimpang dari pengetahuan umum sebelum mengevaluasi insiden khusus.[[17]](#footnote-17)

## Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian ini.

**Bab II Tinjauan Konseptual**, pada bab ini selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan pada penelitian ini meliputi Tinjauan Umum tentang Hukum Tata Negara, Tinjauam Umum tentang Pajak Daerah, Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah, serta Tinjauam Umum tentang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal? (2) Bagaimana dampak restorasi penerapan pajak pertambahan nilai pada restoran di Kota Tegal?.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan secara deskriptif menjawab inti pada permasalahan pada penelitian ini.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Negara

### Pengertian Hukum Tata Negara

llmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang meng-kaji negara dan konstitusi sebagai Objek. Di samping cabang ilmu pengetahuan lain yang menjadikan negara dan konstitwsi sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara. Keduanya merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *staatsrecht* yang dibagi menjadi *staatsrecht* *in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). Hukum tala negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara. Pada umumnya istilah *constitutional law* digunakan di Inggris. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa unsur konstitusi lebih menonjol dalam hukum tata negara, sedangkan *state law* didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum negaranya lebih penting. Di Prancis, Orang menggunakan istilah *droit constitutionnel* sebagai lawan *dari droit administrative*. Sementara itu, istilah hukum tata negara yang digunakan di Jerman adalah *verfassungsrecht* dan istilah hukum administrasi negara adalah *verwalrungsrecht*. Istilah hukum tata negara identik dengan istilah

hukum konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *constitusional law*.[[18]](#footnote-18)

Van Vollenhoven menyatakan bahawa Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.[[19]](#footnote-19) Sebagai murid dari Oppenheim yang terkenal dengan ajaran negara dalam keadaan tidak bergerak untuk menunjukkan Hukum Tata Negara dan negara dalam keadaan bergerak untuk Hukum Administrasi Negara, demikian juga dengan Van Vollenhoven mengikuti jejaknya. Tata Negara membicarakan masyarakat hukum atasan dan bawahan dan hubungannya menurut hierarki serta hak dan kewajibannya masing-masing. Kesemuanya ini menunjukkan negara dalam keadaan statis.

Ilmu Hukum Tata Negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan cabang-cabang ilmu yang lain, yaitu antara lain ilmu Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta ilmu politik. Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari negara dalam sifat-sifatnya yang abstrak, utnum dan universal (terlepas dari suatu negara tertentu, terlepas dari tempat, waktu. dan keadaan tertentu). Sedangkan Hukum Tata Negara adalah yang mempelajari negara dalam sifat-sifatnya yang kongkrit, khusus, tertentu. (negara yang dipelajari sudah ada tertentu, waktu dan tempatserta keadaan juga tertentu). Hukum Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai serang-kaian peraturan-peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara. haik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, pada waktu badan-badan negara itu mulai menjalankan tugasnya seperti yang diberikan oleh Hukum Tata Negara.[[20]](#footnote-20)

### Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara mempunyai ruang lingkup atau mencakup mengenai ketentuan yang mengatur organisasi negara, susunan organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya dan hubungan antar organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara serta mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warganegara mengenai hak dan kewajibannya. Dalam prespektif negara hukum dan demokrasi, kebebasan badan peradilan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. kekuasaan kehakiman dalam melakukan independensinya tidak boleh melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), dan profesionalisme dan impartialitas. Serta kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap hukum atau keadilan maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara formal kedudukan hakim.[[21]](#footnote-21)

Sebagai doktrin ilmu pengetahuan hukum, hukum tata negara lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai sturktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam arti luas, Hukum Tata Negara ini mencakup pula Hukum Administrasi Negara, atau kadang-kadang dipersempit dengan istilah Hukum Tata Usaha Negara sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Jika Hukum Tata Negara memusatkan perhatian pada struktur statis dari negara, maka Hukum Administrasi Negara membahas aspek dinamika dari organisasi negara atau proses bergeraknya fungsi-fungsi organisasi negara itu dalam bentuk tata urutan yang biasa disebut dengan administratif.[[22]](#footnote-22) Fokus obyek penelitian nukum adalah negara negara sendiri. Di mana negara dilihat dalam perspektif sifat atau makna yang nyata bahwa negara itu terbatas pada lokasi, kondisi, dan waktu tertentu. HTN adalah disiplin ilmu hukum yang mempelajari tatanan, struktur negara, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara. Obyek kajian HTN (dalam arti terbatas) berkaitan dengan:

1. Jabatan apa saja yang ada dalam struktur negara.
2. Siapa yang memegang sebuah jabatan.
3. Cara mengisi jabatan dengan pejabat.
4. Tugas pekerjaan pejabat.
5. Otoritas (kekuasaan) jabatan.
6. Interaksi antar badan dan lembaga.
7. Batasan fungsi organisasi negara.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfokus pada pengaturan hubungan antarstruktur negara, tetapi juga menyoroti bagaimana pejabat negara menjalankan tugas dan kewenangannya. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan batasan organisasi negara, sehingga menciptakan tatanan pemerintahan yang terstruktur dan sesuai dengan konteks lokasi, kondisi, dan waktu tertentu.

Asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum positif yang mengatur segala asas dan pengertian dalam penyelenggaraan Negara. Asas hukum tata negara terdiri dari asas pancasila, asas negara hukum asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatua dan asas pembagian kekuasaan (*check and balances*). Asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas pancasila, menjadi sumber pemikiran pokok negara dalam mewujudkan kepribadian bangsa berlandaskan ketuhanan yang adil dan beradab, negara hadir dalam mempersatukan kedaulatan rakyat yang melahirkan keadilan sosial tengah masyarakat.
2. Asas nagara hukum, asas ini berlandaskan negara hukum artinya hukum sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan prinsp “*the rule of law*”.
3. Asas kedaulatan rakyat, asas ini berlandaskan atas kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. pemerintah sebagai penyelenggara negara jika melakukan penyelewengan terhadap negara yang bertentangan dengan rakyat dapat dijatuhkan Oleh rakyat.
4. Asas negara kesatuan, asas ini menegaskan bahwa wilayah negara sebagai bagian dalam satu negara yang berdaulat berbentuk republik.
5. Asas pembagian kekuasaan (*check and balances*), pengertian pembagian kekuasaan adalah kekuasaan penyelenggaraan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian yaitu kekuasaan legeslatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.[[24]](#footnote-24)

Secara keseluruhan, asas-asas dalam hukum tata negara merupakan landasan fundamental dalam menjaga kestabilan dan keadilan penyelenggaraan negara. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas ini, negara dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan hukum, keadilan, dan kedaulatan rakyat, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

## Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

### Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[[25]](#footnote-25) Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabiljuga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber PenerimaanAsli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.[[26]](#footnote-26) Menurut Mardiasmo (Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.[[27]](#footnote-27)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dapat dikatakan efektif jika dapat mendorong peningkatan ekonomi, mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga, dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.[[28]](#footnote-28)

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.[[29]](#footnote-29) Pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya rakyat daerah itu saja, baik yang dipungut Pemda tingkat II maupun tingkat I. contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[[30]](#footnote-30) Terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Lembaga Pemungutnya yaitu Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.[[31]](#footnote-31)

Dengan dua fungsi utama tersebut, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mendukung kebijakan sosial dan ekonomi. Pembagian pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan di tingkat nasional maupun daerah dapat terpenuhi secara optimal.

### Ruang Lingkup Pajak Daerah

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.[[32]](#footnote-32) Pengelompokkan pajak dapat dibagi menjadi dua bagian utama berdasarkan golongannya. Pertama, ada pajak langsung, yang harus ditanggung langsung oleh wajib pajak tanpa bisa dialihkan kepada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Kedua, terdapat pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dapat ditransfer kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pajak juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Pertama, pajak subjektif, yang mengacu pada keadaan individu wajib pajak, seperti PPh. Kedua, pajak objektif, yang berfokus pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan individu wajib pajak, seperti PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara secara keseluruhan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Kedua,pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan rumah tangga daerah, seperti pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.[[33]](#footnote-33)

Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mengadakan pembangunan dan menyedikan prasarana umum bagi masyarakat, seperti berupa jalan raya, jembatan, penerangan jalan, saluran air halte, rumah sakit, sekolah dan berbagai kepentingan umum yang di tunjukan untuk kesehjateraan bagi masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah tiap daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur daeranya sendiri, termasuk juga pemerintah daerah menggali sumber penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat di dari pendapataan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah berupa penerimaan dalam sector pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting untuk membiayayi penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.[[34]](#footnote-34)

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada suatu negara. Menurut Resmi dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

1. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.[[35]](#footnote-35)

Ketiga sistem pemungutan pajak tersebut mencerminkan berbagai pendekatan dalam menghitung dan memungut pajak, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Penerapan sistem ini memerlukan pengawasan dan pemahaman yang mendalam, baik dari pihak Wajib Pajak, aparatur perpajakan, maupun pihak ketiga, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

### Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang seluruh materi muatannya mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah (Perda) dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan masyarakat di daerah berhak memberi masukan, baik secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena kalua bertentangan dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan daerah (Perda) diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.[[36]](#footnote-36)

Jimly Asshiddiqie dalam pembentukan sebuah produk hukum dikenal prinsip *lex superior derogat lex inferior*, yang berati peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tinggi. Akan tetapi, prinsip tersebut dapat dibatasi oleh prinsip *lex spesialis derogat lex generalis*, yaitu peraturan yang umum akan kalah dengan peraturan yang khusus. Dengan adanya prinsip ini pelaksanaan peraturan yangbersifat umum di seluruh daerah dapat mempertimbangkan kemungkinan yang bersifat khusus di daerah. Kekhususan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan yang dimaksud khusus berlaku pada daerah bersangkutan. Namun dalam konteks ini, disentralisasi peraturan daerah cenderung mengenal *lex duperior derogat lex inferiori* dan mengenyampingkan *lex spesialis derogat lex generalis*.[[37]](#footnote-37) Pembentukan Perda oleh pemerintah minimal ada dua hal yang mendasarinya. Pertama, peraturan daerah di bentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. Kedua, bahwa Perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Perda tersebut. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga produk perundang-undangan daerah yangdihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.[[38]](#footnote-38)

Pembentukan peraturan daerah merupakan satu keniscayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai kebijakan di daerah kerap kali harus didasarkan atas adanya legaliltas hukum dalam bentuk peraturan daerah. skema dari desain memiliki wewenang sebagai konsekuensi desentralisasi, daerah dalam hal membentuk peraturan daerah sesuai bingkai otonomi daerah. Namun, perlu dicatat dan dipahami bersama bahwa konsep daerah otonom tidaklah sama dengan konsep Negara bagian. C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri (*eigen houshouonding*).[[39]](#footnote-39) Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (7) dirumuskan pula tentang Peraturan di Tingkat Daerah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
3. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.[[40]](#footnote-40)

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) menjelaskan mekanisme pembentukan peraturan di tingkat daerah yang melibatkan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif di masing-masing tingkatan. Dengan pengaturan yang jelas ini, proses pembentukan peraturan daerah diharapkan berjalan harmonis, sesuai dengan hierarki perundang-undangan, serta mampu mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

### Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui dalam menyusun peraturan daerah yaitu dimulai dengan proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Selain mempunyai kedudukan yang strategis, peraturan daerah juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.[[41]](#footnote-41)

Kedudukan dan fungsinya yang strategis, peraturan daerah menjadi pilar penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjaga keragaman lokal, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan dengan taat asas dan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional agar dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi dan sekaligus perwujudan dari peraturan otonom satamgi. Peraturan otonom ini merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang. Peraruran otonom merupakan peraturan pelaksanaan yang bersumber dari kewenangan atribusi. Dalam atribusi kewenangan pembenttlkan peraturan perundang-undang-an diberikan Oleh undang-undang kepada suatu pemerintahan. Kewenangan ini melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, namun tetap memperhatikan batas-batas yang diberikan. [[42]](#footnote-42) Pada dasarnya peraturan daerah merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan setiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perda. Namun demikian, daerah tidak bisa semerta-merta menyusun peraturan daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan. ada beberapa syarat yang harus dipenuh dalam setiap membentuk peraturan daerah di antaranya:

1. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.
2. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.[[43]](#footnote-43)

Sebagai instrumen hukum yang vital dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan daerah harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip legalitas, kepentingan umum, dan kekhasan daerah masing-masing. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, peraturan daerah dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mendukung pembangunan daerah secara efektif dan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Peraturan Daerah yang berisi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat kontrol. Keputusan kontrol yang berupa peraturan ini akan mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. Pembentukannya harus memberikan ruang kontrol bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses pembentukannya. Dengan partisipasi masyarakat akan dapat mendorongterbentuknya peraturan daerah yang responsive.[[44]](#footnote-44) Setelah pemerintah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD yang juga ikut terlibat dalam pembuatan Perda sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri.[[45]](#footnote-45)

## Tinjauan Umum Tentang Gambaran Umum Kota Tegal

### Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah yang termasuk kedalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kota Tegal berbatasan dengan beberapa wilayah lainnya yaitu, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal, lalu di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Tegal merupakan daerah yang mempunyai posisi yang strategis, karena wilayah daerahnya terletak di jalur pantai utara yang ramai dipadati lalu lalang kendaraan. Posisi strategis yang dimiliki Kota Tegal merupakan salah satu potensi yang dapat menjadikan daerah Kota Tegal lebih berkembang. Hal ini karena jalur pantai utara merupakan jalur penghubung perekenomian lintas nasional dan regional tiga ibukota provinsi di pulau jawa, yaitu Jakarta, Semarang dan Surabaya. Tegal menjadi salah satu kota kabupaten yang telah berdiri sejak lama. Tepatnya telah ditetapkan pada tanggal 12 April 1580. Hal ini diketahui berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1988 tentang penetapan Hari Jadi Kota Tegal.[[46]](#footnote-46)

Luas wilayah Kota Tegal mulai tahun 2020 adalah 39,24 km2, atau sekitar 0,12 persen dari luas Jawa Tengah. Kota ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan. Adapun wilayah Kecamatan terluas adalah Margadana yaitu sebesar 13,29 km2 atau sekitar 33,87 persen dari luas wilayah Kota Tegal. Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa. Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun lembah. Sedangkan untuk keberadaan sungai, Kota Tegal dialiri empat sungai yang melewati 15 kelurahan (55,56 persen). Empat sungai tersebut adalah Ketiwon, Kaligangsa, Gung, dan Kemiri. Sedangkan kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sebanyak 4 kelurahan. Keadaan Iklim Rata-rata suhu udara di Kota Tegal pada tahun 2022 sebesar 27,80C. Dengan rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 24,30C, sedangkan rata-rata suhu udara tertinggi mencapai 32,80C yang terjadi pada bulan September. Pada tahun 2022 prasarana perdagangan yang ada di Kota Tegal meliputi enam department store, 55 pasar swalayan dan minimarket, serta 14 pasar umum. Kegiatan perdagangan di Kota Tegal juga besar peranannya terhadap perekonomian Kota Tegal. Pada tahun 2022 sejumlah Rp628 miliar rupiah investasi dalam negeri masuk untuk kegiatan perdagangan di Kota Tegal, yang menciptakan 7.312 proyek dan menyerap 15.456 tenaga kerja.[[47]](#footnote-47)

Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal. Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di kawasan Jalan Cempaka, sentra produksi telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor, dan kerajinan batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat. Untuk mendukung denyut perekonomian, pemerintah Kota Tegal telah membangun Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB). Sektor perikanan juga memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Tegal. Letak geografis Kota Tegal yang berada di pesisir Laut Jawa, menjadikan Kota Tegal memiliki produksi dan nilai produksi perikanan yang lumayan besar. Pada tahun 2020, produksi perikanan laut paling tinggi terdapat pada Triwulan IV yaitu mencapai 8.013.193 kg dengan nilai 57.170.905.000 rupiah. Sedangkan untuk perikanan darat, budi daya Tambak merupakan penghasil perikanan tertinggi dibanding sarana budi daya yang lainnya yaitu sebesar 5.827,13 kuintal dengan nilai produksi 9,372 miliar di tahun 2020.[[48]](#footnote-48)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapaan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha–usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan PAD digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk itu setiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Untuk mengoptimalkan PAD ada beberapa pos pendapaan asli daerah yang harus ditingkatkan diantarannya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain. Kota Tegal terkenal dengan kota Bahari karena dekat dengan pantai termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal merupakan daerah yang cukup strategis untuk pusat perekonomian. Salah satu penerimaan daerah di Kota Tegal adalah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayan daerah tersebut. Di Kota Tegal pajak daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Dengan banyaknya sumber pajak daerah yang dimiliki pemerintah daerah, maka Kota Tegal memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.[[49]](#footnote-49) Realisasi Pendapatan Kota Tegal pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.052.246.607.757,- dari target anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.137.851.249.927,- atau realisasi pendapatan daerah sebesar 92,48% (sembilan puluh dua koma empat puluh delapan persen). ndapatan dengan anggaran pendapatan daerah: Rp1.137.851.249.927,- dan realisasi pendapatan daerah Rp1.052.246.607.757,- realisasi pendapatan daerah sebesar 92,48%.[[50]](#footnote-50)

1. Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Agus Prawoto, *Pengarnar Keuangan Puhlik*, Yogyakarta: BPFE-Yogkyakarta, 2011, hlm. 186. [↑](#footnote-ref-3)
4. Asyifa Tiara Ardin, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, Ferry Irawan, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela”, *Journal of law, Administration, and Social Science*, 2 (1) 2022, hlm. 34. http://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/165. [↑](#footnote-ref-4)
5. Satriawaty Migang, Wani Wahyuni, “Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23 (1), 2020, hlm. 1. http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1095. [↑](#footnote-ref-5)
6. Badan Keuangan Daerah Kota Tegal “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tegal” diakses melalui https://bakeuda.tegalkota.go.id/index.php/54-optimalisasi-penerimaan-pajak-daerah-di-kota-tegal pada tanggal 4 November 2023 pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. BPK RI diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Details/164464/perda-kota-tegal-no-2-tahun-2019 pada tanggal 4 November 2023 pukul 21.30 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Puhaneng Enike Limpong “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pajak Daerah Dalam Kegiatan Usaha Di Kota Manado”. *Jurnal Lex Administratum,* 5 (8), 2017. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18026. [↑](#footnote-ref-8)
9. Buyung Cahyoadi. “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Sosiologi Hukum” *Skripsi Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,* 2016. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32279. [↑](#footnote-ref-9)
10. Radit Yuniardita Jaya Subangkit, R.A Rini Anggaraini, Ida Bagus Oka Ana. “Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, *Artikel Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara,* 2014. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59012. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Penulis dan Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm.2-3. [↑](#footnote-ref-11)
12. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.199. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index. php?p=show\_detail&id=10637&keywords=. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34 [↑](#footnote-ref-13)
14. Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm.130 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1974, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.104 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Depok: Rajagrafindo, 2019, hlm.71. [↑](#footnote-ref-17)
18. Faisal Akbar Nasution, Andryan, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023:1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibnu Sam Widodo, *et.al*, *Hukum Tata Negara*, Banten: Sada Kurnia Pustka, 2023:4. [↑](#footnote-ref-19)
20. Siti Afiyah, Abd. Hadi, *Hukum Tata Negara*, Lamongan: Academia Publication, 2024:7. [↑](#footnote-ref-20)
21. Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016:34. [↑](#footnote-ref-21)
22. Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022:12 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Ardhi Razaq Abqa, *et.al*, *Hukum Tata Negara : Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023:11. [↑](#footnote-ref-23)
24. Thahir, *et.al*, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Jambi: Sonpedia, 2024:6-7 [↑](#footnote-ref-24)
25. Erica Pebrianak, “Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan UU HKPD Nomer 1 Tahun 2022 Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 2024:13. https://jap.unram.ac.id/index.php/jap/article/view/59/50. [↑](#footnote-ref-25)
26. Audi Fazhillah, Nurlaila, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih”, *Jura: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 2024:23. https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/1694/1564. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sugeng Suprapto, Rachyu Purbowati, “Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1), 2024:3. https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/article/view/28/25. [↑](#footnote-ref-27)
28. Eliyana Sipahutar, Muhammad Arif, Nurfadhilah Ahmad, “Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 4(1), 2024:303. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/4988/3587. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wahyu Widodo, Nova Maulud Widodo, Ardila Prihadyatama, “Rasio Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Madiun Tahun 2018-2022)”, *Jurnal Maneksi*, 13(1), 2024:11. https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/1898. [↑](#footnote-ref-29)
30. Usdeldi, Atar Satria Fikri, IkaJasumaPutri, “Analisis EfektivitasDan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 2024:17. https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JIMEB/article/view/853/663. [↑](#footnote-ref-30)
31. Alaeda Putri Lestari, Ikhwan Wadi, Abdul Manan, “Implementasi Uu Hkpd No.1 Tahun 2022 Tentang Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Lombok Tengah”, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 2024:35. https://jap.unram.ac.id/index.php/jap/article/view/67/52. [↑](#footnote-ref-31)
32. Dini Sri Wardhani, Trisna Sonjaya, “Penglolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang)”, *Semnasia*, 1(1), 2024:77. http://kampus.stiabanten.ac.id/ojs/index.php/pena/article/view/154. [↑](#footnote-ref-32)
33. Nuriyah, Ersi Sisdianto, “Analisis Terkait Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Media Akademik*, 2(4), 2024:4. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/254/245. [↑](#footnote-ref-33)
34. Laila Amalia, Diana Prihadini, Lusia Wina Widyatasari, “Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Kalimatan Barat (Study Kasus Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 2024:48. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3627/1799. [↑](#footnote-ref-34)
35. Fransiska Riang Hati Zebua*, et.al*, “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penetapan Njop Berdasarkan Perhitungan Pajak Daerahpada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli”, *Visi Sosial Humaniora*, 5(1), 2024:93-94. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/2308/977. [↑](#footnote-ref-35)
36. Adrie, S, I Ketut Suardita, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian”, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 18(1), 2024:66. https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1196. [↑](#footnote-ref-36)
37. Jimly Asshiddiqie, *Desentralisasi Dan Pluralisme Hukum Kapita Selekta Teori Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000:84-85. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sadriah Lahamit, “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau(Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)”, *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 2021:33. https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/6766/3237. [↑](#footnote-ref-38)
39. Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth, 2012:31. [↑](#footnote-ref-39)
40. Basri Mulyani, “Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law”, *Juridica*, 3(2), 2022:69. https://www.researchgate.net/profile/Basri-Mulyani/publication/360868827. [↑](#footnote-ref-40)
41. Arie Elcaputera, Ahmad Wali, Ari Wirya Dinata, “Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 11(1), 2022:123. https://scholar.archive.org/work/dtdheekh3na7jkbnxzis2r6pca/access/wayback/https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/8236/pdf. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022:24. [↑](#footnote-ref-42)
43. Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah, “InefisiensiPeraturan Daerah di Indonesia”, *Rechtenstudent Journal*, 3(1), 2022:52-53. https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/92/67. [↑](#footnote-ref-43)
44. Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009:100 [↑](#footnote-ref-44)
45. Rizki Jayuska, Ismail Marzuki, “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021”, *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 2021:163. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/2464/1910. [↑](#footnote-ref-45)
46. Isna A’yunina, Putri Agus Wijayati, “Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Tahun 2019”, *Journal of Indonesian History*, 11(2), 2023:87. https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/72551. [↑](#footnote-ref-46)
47. Jatengdaily, Tegal Kota Bahari Berpotensi Perdagangan, Diakses melalui https://jatengdaily.com/2023/tegal-kota-bahari-berpotensi-perdagangan/, Pada 15 Januari 2025 Pukul 18.00 WIB [↑](#footnote-ref-47)
48. Wikipedia, Kota Tegal, Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\_Tegal, Pada 15 Januari 2025 Pukul 18.35 WIB. [↑](#footnote-ref-48)
49. Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”, *Diponegoro Journal Of Economics*, 3(1), 2014:1-2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5292/5096. [↑](#footnote-ref-49)
50. Utha, “Realisasi Pendapatan Kota Tegal TA 2023”, *Pemerintah Kota Tegal*. Diakses melalui https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com\_content, pada 15 Januari 2025 Pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-50)